



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk memenuhi kebutuhan Regulasi di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2018);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 125).

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 100.3/03462 tanggal 21 November 2025 Perihal Usulan Propemperda Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.
 2. Laporan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2025.
 3. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan hari Jumat tanggal 28 November 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah ini karena alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kajen

Pada Tanggal 28 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



ABDUL MUNIR

Tembusan:

1. Bupati Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan
Nomor : W /2025
Tanggal : 28 November 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Usul prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

NO	JUDUL RAPERDA	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025	BPKD
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026	BPKD
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2027	BPKD
4.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2026-2046	BAPPERIDA
5.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan tahun 2026-2056	DINAS PERKIM DAN LH
6.	Penataan Desa	DINAS PMD
7.	Penyertaan Modal BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
8.	Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2046	DPU TARU

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pekalongan.

NO	JUDUL RAPERDA	PEMPRAKARSA
1.	Penguatan Moderasi Beragama	BAPEMPERDA
2.	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	BAPEMPERDA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


ABDUL MUNIR